

**PENGARUH KOMITMEN PENGURUS, KOMPETENSI
PENGELOLA DANA DAN AKSESIBILITAS LAPORAN TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
(Studi Empiris pada Partai Politik yang Memperoleh Dana Bantuan yang
bersumber dari APBD Periode 2019-2024 di Kota Solok)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2021**

**THE EFFECT OF ADMINISTRATOR'S COMMITMENT,
COMPETENCY OF FUND MANAGER AND THE REPORT
ACCESSIBILITY TO ACCOUNTABILITY FINANCE
MANAGEMENT OF POLITICAL PARTY
(Empirical Study to Political Party that get Donation From APBD in the Period
2019-2024 In Solok City)**

ASNELI
NPM: 191000462201027

Advisors : 1. JUITA SUKRAINI, SE, M.Si
2. Dr. SISKI YULIA DEFITRI, SE, M.Si.

Abstract

The purpose of the research is to find out and analyze the effect of political party administrator's commitment, competency of fund manager and accessibility of report to accountability manage the finance of political party in Solok City. This research is quantitative research with the association approach. Population and sample of this research is the Political Party Administrator in Solok City as mush 33 respondent. Gathering data is by using questionnaire. Hypothesis test is using multiple linear analysis by SPSS version 25. The result of the research can be found that: (1). The administrator's commitment is have positif effect and significant to the accountability financial management of political party; (2). The Fund Manager's competency have positive effect and significant to the accountability financial management of political party; (3). Accessibility of the Report don't have effect to the accountability financial management of political party; (4). The Administrator's Commitment, The Fund Manager's Competency and accessibility of the report have a effect by simultant to the accountability financial management of political party. The big of effect independent variable, they are the administrator's commitment, fund manager's competency, and accessibility of the report to dependent variable is accountability financial management of political party that explained by equation model in this research is 94,4%. Whereas the residual is 5,6% that explained by the other factors that don't include in this model. The implication of this research is to stimulate the management of political party financial that accountable by enhancement the administrator's commitment, the fund manager's competency, and accessibility of the report.

Key Words: Commitment, Competency, Accessibility, Accountability, Political Party

PENGARUH KOMITMEN PENGURUS, KOMPETENSI PENGELOLA DANA DAN AKSESIBILITAS LAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

**(Studi empiris pada Partai Politik yang memperoleh dana bantuan yang bersumber
dari APBD Periode 2019-2024 di Kota Solok)**

ASNELI

NPM: 191000462201027

Pembimbing : 1. JUITA SUKRAINI, SE, M.Si

2. Dr. SISKI YULIA DEFITRI, SE, M.Si.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komitmen pengurus, kompetensi pengelola dana dan aksesibilitas laporan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik di Kota Solok. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel adalah Pengurus Partai Politik di Kota Solok yang berjumlah 33 responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Komitmen Pengurus berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik; (2). Kompetensi Pengelola Dana berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik; (3). Aksesibilitas Laporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik; (4). Komitmen pengurus, kompetensi pengelola dana dan aksesibilitas laporan berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik. Besarnya pengaruh variabel independen, yaitu komitmen pengurus, kompetensi pengelola dana, dan aksesibilitas laporan terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik yang diterangkan oleh model persamaan dalam penelitian ini adalah sebesar 94,4%. Sedangkan sisanya sebesar 5,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Implikasi temuan penelitian ini adalah untuk mendorong pengelolaan keuangan partai politik yang akuntabel melalui peningkatan komitmen pengurus, kompetensi pengelola dana, dan aksesibilitas laporan.

Kata Kunci: Komitmen, Kompetensi, Aksesibilitas, Akuntabilitas, Partai Politik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran partai politik dewasa ini sangat signifikan dalam sistem politik di Indonesia karena menjadi poros penting dalam proses demokrasi. Partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara, tetapi juga untuk mengintegrasikan para individu dan kelompok dalam masyarakat ke dalam sistem politik. Partai politik tidak hanya berperan dalam mempersiapkan para kader calon pemimpin bangsa untuk dicalonkan melalui pemilihan umum (pemilu) untuk menduduki berbagai jabatan dalam lembaga legislatif atau eksekutif, tetapi juga memperjuangkan kebijakan publik berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Partai politik merupakan institusi publik yang mempunyai peran besar dalam menjaga demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, dan bebas korupsi. Namun peran penting tersebut tidak dengan sendirinya berjalan dengan baik. Keterbatasan struktural dan finansial menyebabkan partai politik gagal dalam menjalankan fungsi perantara.

Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada partai politik, maka partai harus memperbaiki tata kelola organisasi dengan transparan dan akuntabel. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 39 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Wewenang yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini memuat dua ketentuan tentang bantuan keuangan partai

politik: pertama, penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik; kedua, laporan penggunaan bantuan partai politik diaudit oleh BPK. Undang-Undang tersebut juga menjelaskan dengan rinci sumber keuangan partai politik yaitu : pertama iuran anggota, kedua sumbangan, dapat berupa uang, barang dan/atau jasa, yang sah menurut hukum dan ketiga bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik merupakan dasar munculnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana partai politik, maka partai politik yang tidak transparan dan akuntabel dalam mengelola dana Partai Politiknya akan menimbulkan kemungkinan indikasi awal untuk melakukan *money politic* dan korupsi yang dilakukan oleh oknum elit politik, oleh sebab itu tata kelola partai politik di Indonesia perlu segera dilakukan pembenahan secara fundamental dengan cara membangun transparansi institusinya, terutama pada pelaporan dana terkait pengelolaan dana bantuan partai politik yang bersumber dari APBD (Kholmi, 2010a)

Terkait pengelolaan sumber daya *financial*, temuan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menyebutkan bahwa keuangan partai politik di tingkat nasional dan beberapa daerah menunjukkan persoalan mendasar di kelembagaan partai politiknya. Hal ini disebabkan oleh minimnya transparansi dan akuntabilitas partai politik, khususnya pada pengelolaan keuangannya (Simarmata, 2018)

Atas berbagai sumber dana yang diterima, sebagian besar partai politik hanya memiliki laporan keuangan yang berasal dari APBN dan APBD . Saat ini administrasi keuangan partai politik tampak belum tertib. Hampir semua partai politik melaporkan penggunaan dana bantuan keuangan tidak sesuai dengan peruntukan. Laporan pertanggungjawaban pun, terkadang dalam format yang sangat sederhana dalam selembarnya kertas. Selain itu, banyak pula partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Padahal, format laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan itu sangat sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang diperjelas lagi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Supriyanto, Didik dan Wulandari, 2012;59)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik tahun 2019 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap 11 Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Solok masih terdapat beberapa partai politik yang laporan pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahkan ada partai politik yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban bantuan keuangannya. Hal ini mencerminkan bahwa partai politik masih belum sepenuhnya menerapkan

prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya, terutama dana bantuan yang bersumber dari APBD.

Masih rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik di Indonesia, salah satunya berkaitan erat dengan komitmen dari pengurus partai politik untuk menyajikan laporan keuangan partai politik secara akuntabel dan transparan. Selain komitmen yang kuat dari pengurus partai, kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengelolaan keuangan partai politik juga menjadi tolak ukur keberhasilan akan proses akuntabilitas dan transparansi dari partai politik itu sendiri. Ditambah lagi dengan adanya keterbukaan partai terhadap penyajian laporan keuangannya sehingga prinsip transparansi dan akuntabel yang diharapkan dapat tercapai.

Sebagaimana yang sudah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 38 dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik terbuka untuk diketahui masyarakat. Dengan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel akan memudahkan dalam memberikan informasi mengenai laporan keuangan.

Aksesibilitas laporan keuangan partai diperlukan agar informasi mengenai laporan keuangan lebih transparan dan publik dapat mengakses informasi-informasi keuangan dari Partai tersebut. Aksesibilitas laporan keuangan partai dikatakan baik apabila partai mampu memfasilitasi dan memberikan kemudahan kepada publik dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan partainya. Selain menyajikan laporan keuangan,

partai juga harus bisa memberikan kemudahan bagi publik dalam mengakses laporan keuangannya.

Pelaporan keuangan partai politik yang diumumkan kepada masyarakat tidak hanya dapat meningkatkan kinerja partai politik dan menarik simpati rakyat terhadap partai politik tersebut namun juga dapat menjadi alat bukti tertulis tentang siapa saja yang memberikan sumbangan, berapa sumbangan yang diperoleh, untuk apa saja sumbangan tersebut digunakan dan berapa jumlah sumbangan yang digunakan untuk pekerjaan partai politik. Bukti tertulis yang disahkan oleh pejabat partai dan/atau pejabat publik merupakan bukti yang sempurna dalam pembuktian penyimpangan penggunaan dana keuangan partai politik (Simarmata, 2018).

Asumsi bahwa kompetensi pengelola dana dan komitmen dari pengurus mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana partai didasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Purbasari & Yuniarta, (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berdampak positif terhadap pengelolaan dana desa selanjutnya Mada et al (2017) menyatakan kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sejalan dengan itu Kurnia, (2013) juga menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh kompetensi pegawai dan komitmen organisasi, dikuatkan lagi oleh penelitian Triantoro & Kurnia (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi

pegawai dan komitmen organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurkhasanah (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut dilaksanakan pada konteks organisasi pemerintahan. Untuk konteks partai politik ada satu penelitian dari Riza (2020) yang memuat bahwa komitmen ketua partai berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan dana kampanye namun kompetensi pengelola dana kampanye tidak berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan dana kampanye. Sepanjang yang peneliti ketahui, belum ada literatur yang membahas tentang hubungan antara komitmen pengurus dengan akuntabilitas keuangan partai politik serta kompetensi pengelola dana dengan akuntabilitas keuangan partai politik.

Disamping komitmen dari pengurus partai dan kompetensi pengelola dana partai, aksesibilitas terhadap laporan keuangan partai juga dapat menjadi tolak ukur terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangannya, beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sande (2013) menunjukkan bahwa Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kemudian pada penelitian Christy Natalia Lewier (2012) juga menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara individu (parsial) maupun secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah. Penelitian tersebut dilaksanakan pada konteks organisasi pemerintahan. Untuk konteks partai politik sepanjang yang peneliti ketahui belum ada literatur yang membahas tentang hubungan antara aksesibilitas laporan keuangan dengan akuntabilitas keuangan partai politik.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, komitmen pengurus, kompetensi pengelola dana dan aksesibilitas laporan merupakan faktor-faktor yang dipandang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik. Namun hasil dari penelitian terdahulu masih menunjukkan inkonsistensi. Untuk itu, penulis memandang perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai **Pengaruh Komitmen Pengurus, Kompetensi Pengelola Dana dan Aksesibilitas Laporan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik** (Studi empiris pada partai politik yang memperoleh dana bantuan yang bersumber dari APBD periode 2019 – 2024 di Kota Solok).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah komitmen pengurus berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik
2. Apakah kompetensi pengelola dana berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik
3. Apakah aksesibilitas laporan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik

4. Apakah komitmen pengurus, kompetensi pengelola dana dan aksesibilitas laporan berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah menjawab dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh komitmen pengurus terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi pengelola dana terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik
3. Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik
4. Untuk mengetahui pengaruh komitmen pengurus, kompetensi pengelola dana dan aksesibilitas laporan secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pentingnya komitmen pengurus dan kompetensi pengelola dana terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik khususnya partai politik yang ada di Kota Solok.

2. Dapat memberikan manfaat sekaligus dapat dijadikan referensi dalam pengelolaan keuangan partai sehingga tata kelola keuangan partai politik akan lebih baik lagi.
3. Memberikan kontribusi dalam membuat kebijakan terkait pengelolaan dana partai politik agar kebijakan tersebut memberikan dampak yang baik bagi partai itu sendiri maupun bagi pemerintah.
4. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- BAB I : PENDAHULUAN**
Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan
- BAB II : LANDASAN TEORI**
Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam pembentukan hipotesis, kerangka pemikiran yang akan menjelaskan mengenai garis besar penelitian, dan pengembangan hipotesis yang digunakan di penelitian ini.
- BAB III : METODE PENELITIAN**
Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, sumber data, populasi, sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran serta teknik analisis data.
- BAB IV : PEMBAHASAN**
Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, pengujian dan hasil analisis data, dan pembahasan hasil analisis data.
- BAB V : PENUTUP**
Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif untuk melihat dan menguji pengaruh komitmen pengurus partai, kompetensi pengelola dana dan aksesibilitas laporan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik di Kota Solok. Akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik menjadi penting karena dana tersebut bersumber dari dana APBD, sehingga partai politik harus mengungkapkan semua informasi terkait penggunaan dana secara akuntabel (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 39 Ayat 1).

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan pengujian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Komitmen Pengurus berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik. Tingginya komitmen pengurus partai dalam mendorong tersajinya laporan keuangan partai politik yang akuntabel dipengaruhi oleh personality pengurus partai dan karakteristik partai. Personality pengurus partai berkaitan dengan keinginan pengurus partai itu sendiri agar partai politik yang dipimpinnya terus berkelanjutan. Selain itu, karakteristik partai juga mempengaruhi komitmen pengurus partai untuk mendorong partai dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politiknya.

2. Kompetensi Pengelola Dana berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik. Hal ini menunjukkan semakin berkompeten pengelola dana partai maka semakin baik pula dalam pengelolaan keuangannya untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Aksesibilitas Laporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa Partai politik belum memberikan akses bagi pengguna laporan keuangan serta belum dipublikasikannya laporan keuangan partai politik. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi atau aturan yang baku mengenai standar harga dan biaya yang digunakan dalam pemakaian dana bantuan APBD untuk partai politik. Tentu saja hal ini akan berakibat tidak adanya kontrol yang baik terhadap penggunaan dana publik.
4. Komitmen pengurus, kompetensi pengelola dana dan aksesibilitas laporan berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik.

5.2 Saran

Dari hasil kesimpulan tersebut di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Akuntabilitas pengelolaan dana partai politik sangat dipengaruhi oleh komitmen ketua partai. Oleh karena itu sebaiknya ketua partai dapat menjadi contoh bagi pengurus partai lainnya untuk memiliki komitmen yang tinggi terhadap partai politiknya, sehingga kewajiban untuk menyajikan laporan dana partai secara akuntabel didukung oleh semua orang yang ada dipartai.

2. Pihak-pihak yang berperan sebagai regulator harus merancang dan mengesahkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna laporan dana partai politik. Karena fenomena yang ditemukan peneliti dilapangan terdapat *missing information* antara pihak pembuat regulasi dengan partai politik sebagai pihak yang menyajikan laporan keuangannya. *Missing information* disini adalah adanya informasi yang tidak sampai dan tidak lengkap kepada pihak partai politik dalam hal peraturan, khususnya terkait pelaporan dana bantuan parpol. Misalnya apa saja yang harus dilengkapi partai politik dalam laporan dananya dan dokumen apa saja yang harus dilampirkan di dalam laporan dana partainya.
3. Kebijakan yang telah disahkan agar disosialisasikan dengan maksimal agar *missing information* tidak lagi terjadi. Sehingga kedepannya akuntabilitas pengelolaan dana partai dapat terwujud. Salah satunya dengan partai politik membuka akses kepada publik terkait dengan pengelolaan dana partainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiatus Sobrina. (2012). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Ditinjau dari Segi Good Governance (Studi Kasus DPW PAN Jawa Timur pada Pemilu 2009)*.
- Anggraeni, dan Kiswaran. (2011). *Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro Semarang.
- Arif Widyatama, Lola Novita, D. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, Vol. 02 No. 02 (2017): 1-20, 02(02), 1-20*.
- Asshidiqie, J. (2011). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bastian, I. (2007). *Akuntansi LSM dan Partai Politik*. Salemba Empat.
- Budiardjo, M. (2011). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Christy Natalia Lewier, C. H. K. (2012). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten*. 1-14.
- Darsono Dan Tjatjuk, Siswandoko. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia Abad 21*. Nusantara Consulting. Jakarta
- Efriza. (2012). *Political Explore*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Fauziyah, M. R. (2017). *Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Juni 2017*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, Y. (2015). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Partai Politik (Studi pada 9 Partai Politik di Kota Bandung)*. Universitas Pasuruan, 2015.

- Hehanussa, Salomi J. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksestabilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparasi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. 2 nd Conference in Business, Accounting and Maangement (CBAM), 2(1):82-89
- Herliana, W, Andini. (2016). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014), Skripsi, Universitas Bakrie, Jakarta
- Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. (2008). Kompetensi Plus. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ichalina, F., & Handayani, N. (2019). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8.
- Kelly, T, Nina. (2018). *Accountability and Employee Performance*, Centria University of Applied Sciences
- Kholmi, M. (2010a). *Persepsi Konstituen Terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik (Studi di Kota Malang)*. 1945, 207–222.
- Kholmi, M. (2010b). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Partai Politik. *Ekonomika-Bisnis*, 01, 215–226.
- Kholmi, M. (2013). Persepsi Pengurus Partai terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 363–371. <https://doi.org/10.22219/jrak.v3i1.1468>
- Kurnia, I. F. (2013). Pengaruh Kompetensi Pegawai dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)) di Kota Bandung. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Kurniadi, B. (2019). *Indonesia Political Development: Democracy, Political Parties in the Political Education Perspective*. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Jakarta International Conference on Social Sciences and Humanities.
- Lunenburg. (2012). Compliance Theory and Organizational Efektiveness. *International Journal Of Scholarly Academic Intellectual Diversity* Vol. 14,

No. 1.

- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. *Universitas Sam Ratulangi*, 106–115.
- Mardiasmo. (2014). Akuntansi Sektor Publik.. Edisi Lima. Cetakan Keempat. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363.
- Milgram, Stanley. (1963). “Behavioral Study of Obedience,” *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67:371–378. Yale University.
- Mustofa, Anies.I. (2012). Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
- Nanang Martono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Nurkhasanah. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Universitas Islam Negeri Walisongo*.
- Purbasari, P. I., & Yuniarta, G. A. (2020). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia , budaya organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(1), 24–33.
- Rivai, V., & Sagala, E. J. (2009). Manajemen sumber daya manusia. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Riza, S. R. I. W. (2020). *Pengaruh Komitmen Ketua Partai, Kompetensi Pengelola Dana Kampanye Partai Dan Ukuran Partai Terhadap Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum 2019 Dengan Peranan Bawaslu Sebagai Variabel Moderating*.

- Robbins, P. S. (2015). *Perilaku Organisasi* (Edisi 16). Salemba Empat.
- Rudy. (2013). Konstitusionalisme Indonesia. *Jurnal Konstitusi PKKPUU FH UNILA*.
- Sande, P. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi, 2013 - Ejournal.Unp.Ac.Id*, 1–20.
- Sedarmayanti. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. PT. Refika Aditama.
- Simarmata, M. H. (2018). Hambatan transparansi keuangan partai politik dan kampanye pemilihan umum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1), 21–36.
- Siti Umaira, A. (2019). Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada kabupaten aceh barat daya) 1,2. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 4, No. 3, (2019) Halaman 471-481, 4(3)*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, R&D*. CV. Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Supriyanto, Didik dan Wulandari, L. (2012). *Bantuan Keuangan Partai Politik* (Cetakan I, Issue September). Yayasan Perludem.
- Superdi. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sijunjung) *JOM Fekon*, Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017.
- Sutrisno, E. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, cetakan keenam. Penerbit: Kencana Pranada Media Group. Jakarta.
- Triantoro, A., & Kurnia, F. (2014). *Pengaruh Kompetensi Pegawai dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung*. 17(November).
- Umami, Z. (2010) . Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Kepatuhan

Terhadap Aturan pada Mahasiswa Penghuni Ma'had Sunan Ampel Al-Aly di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi, Dipublikasikan. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Vathanophas, V. (2010). *Competency Requirements for Effective Job Performance in The Thai Public Sector*. Mahidol University. Contemporary Management Research Pages 45-70, Vol.3 , No.1, March 2007

Wibowo. (2017). *Manajemen Kinerja*. Rajawali Pers.

Yildirim, M. Acar., Bayraktar,U. (2015). *The Effect of Organizational Commitment and Job Commitment to Intention to Leave of Employment: A Research in Hotel Management*. International Journal of Business and Social Science. Vol. 6, No. 11(1).